**J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah**
**Vol.4, No.1, Desember 2024**

# Analisis Program Pendidikan S1 Agribisnis Menuju Kesiapan Kerja Narapidana di Lapas Kelas I Madiun

**Berniko Dwiantoro[1], Ade Cici Rohayati[2]**
[1,2]Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
E-mail: bernikootosaka@gmail.com[1], adecicirohayati@gmail.com[2]

**Article History:**
Received: 10 Desember 2024
Revised: 26 Desember 2024
Accepted: 30 Desember 2024

**Keywords:** *Narapidana, Lapas, Keterampilan, Kesiapan, Implementasi*

***Abstract:*** *Pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membuka pintu untuk transformasi positif dalam perilaku dan pola pikir narapidana. Oleh karena itu, hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan menciptakan peluang bagi mereka untuk memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan diri mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang lebih produktif dan bermoral tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana implementadi dari program Pendidikan S1 agribisnis menuju kesiapan kerja narapidana di lapas kelas I madiun dan kesiapan kerja narapidana setelah mengikuti program ini. Narapidana di lapas kelas I Madiun ialah narasumber utama dalam peneltian ini. Secara keseluruhan narapidana yang mengikuti program ini menjadi jauh lebih siap untuk bekerja dikarenakan mereka sudah memiliki bekal bekal yang mereka percaya dapat membantu mereka nanti saat pembebasan nanti.*

## PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat sebagai Lapas, merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap fungsi pemasyarakatan, salah satunya adalah pembinaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2022. Lapas berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Meskipun pada awalnya dikenal sebagai penjara, Lapas kini berperan sebagai tempat yang menampung beragam individu, termasuk narapidana, warga binaan pemasyarakatan, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan. Konsep ini menggantikan pola pemenjaraan setelah diusulkan oleh Dr. Sahardjo S.H dalam Konferensi Lembang pada tanggal 27 April 1964, dan secara resmi, istilah "Pemasyarakatan" menggantikan istilah "Pemenjaraan". Sesuai dengan perubahan ini, Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi bagi mereka yang berada di dalamnya. Undang-Undang tersebut mencerminkan perubahan paradigma dalam pendekatan terhadap penanganan individu yang melibatkan sistem pemasyarakatan.

Pendidikan, seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dan dikutip oleh Alisuf Sabri, didefinisikan sebagai proses membimbing potensi alamiah pada anak-anak untuk membentuk mereka menjadi individu yang berkontribusi pada masyarakat, mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang optimal. Pemikiran ini sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, dengan kewajiban untuk mengikuti program pendidikan dasar yang disediakan oleh pemerintah. Ki Hajar Dewantara mengajukan visi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis,

tetapi juga pada pengembangan potensi alami anak-anak agar mereka dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat UUD 1945 Pasal 31 yang menegaskan hak universal atas pendidikan, yang diterjemahkan sebagai tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan akses dan memastikan setiap warga negara mengikuti program pendidikan dasar. Dengan demikian, pendidikan dianggap sebagai pangkal kemajuan dan kebahagiaan individu serta kontribusi positif pada keseluruhan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 9 huruf c menegaskan hak narapidana yang menjalani pidana penjara untuk "mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi." Interpretasi dari ketentuan ini, seperti yang diungkapkan oleh Drikarya dan dikutip oleh Fuad Ihsan, memandang pendidikan sebagai suatu usaha yang bertujuan memanusiakan manusia muda. (Munir Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, 2018) Konsep ini menekankan urgensi memberikan peluang belajar kepada generasi muda, termasuk narapidana, yang memiliki hak yang sama untuk mengembangkan diri. Dalam konteks ini, penting untuk mencermati bahwa pandangan masyarakat tentang pendidikan sangat memengaruhi kemajuan dan perkembangan suatu negara.

Pendidikan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga membuka pintu untuk transformasi positif dalam perilaku dan pola pikir narapidana. Oleh karena itu, hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan menciptakan peluang bagi mereka untuk memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, dan mempersiapkan diri mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang lebih produktif dan bermoral. Hak ini mencerminkan komitmen sistem peradilan pidana untuk memperbaiki, merehabilitasi, dan meresosialisasi narapidana sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mencapai tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Konsep ini menggarisbawahi urgensi pendidikan sebagai salah satu elemen kunci yang mendorong kemajuan sosial, ekonomi, dan kultural.

Hak pendidikan bagi narapidana tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai investasi dalam membangun kemampuan dan keahlian yang dapat membantu mereka dalam reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Ini menjadi faktor utama dalam upaya meningkatkan IQ nasional. Sejak UUD 1945 berlaku, semua orang setuju bahwa pendidikan sangat penting dan strategis untuk pembangunan suatu negara. Suatu negara tidak dapat bersaing di kancah internasional kecuali masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Itulah mengapa sangat penting bagi pembuat kebijakan dan profesional di bidang pendidikan untuk berupaya meningkatkan standar sekolah.

## LANDASAN TEORI

### Teori Implementasi

Menurut penjelasan dari Edwards III, dalam Agus Subianto, 2020, terdapat empat variabel utama yang memiliki dampak signifikan terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini tidak hanya memiliki hubungan satu sama lain, tetapi juga memainkan peran krusial dalam kesuksesan pelaksanaan kebijakan publik. Model implementasi kebijakan publik yang dikenal dengan pengaruh langsung dan tidak langsung mencerminkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang efektif, sikap positif dalam disposisi pelaksana, alokasi sumber daya yang memadai, dan komunikasi yang efektif. Dalam konteks ini, struktur birokrasi yang baik harus mampu mendukung pelaksanaan kebijakan tanpa hambatan yang signifikan. Disposisi pelaksana yang positif menjadi penentu penting, mengingat kebijakan dapat terhambat jika para pelaksana tidak memiliki sikap yang mendukung. Sumber daya yang memadai, baik dalam hal personil

maupun keuangan, juga menjadi faktor penting untuk kesuksesan implementasi. Terakhir, komunikasi yang efektif menjadi fondasi untuk memastikan pemahaman yang tepat dan sinkron antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan memahami dan mengelola variabel-variabel ini, implementasi kebijakan dapat diarahkan menuju pencapaian hasil yang optimal.

**Variabel Komunikasi**

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik seringkali dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi. Para pengambil keputusan perlu memahami dengan jelas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka akan melaksanakannya agar implementasi dapat berhasil. Komunikasi yang baik dapat memastikan pemahaman yang tepat terkait tujuan kebijakan dan langkah-langkah yang harus diambil. Oleh karena itu, transparansi dan klaritas dalam berkomunikasi menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi karena kebijakan melewati berbagai tingkat birokrasi. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan variabel komunikasi tersebut. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transmisi: transmisi yang efektif memungkinkan pelaksanaan yang lancar. Komunikasi seringkali dapat menyebabkan kesalahpahaman karena melewati berbagai tingkat birokrasi, sehingga maksud awal dapat terdistorsi dalam prosesnya.
2. Kejelasan: Para pelaksana kebijakan harus berkomunikasi dengan cara yang jelas dan tidak merugikan pemahaman.
3. Konsistensi: Arahan untuk pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Jika terjadi perubahan-arahan yang tidak konsisten, hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan di lapangan.

**Variabel (*Resources*) Sumber Daya.**

Untuk melaksanakan suatu kebijakan, sumber daya atau aset sangat penting. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Personel menjadi elemen utama dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kegagalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dapat disebabkan oleh kekurangan personel, personel yang tidak memadai, atau kurangnya kompetensi di bidang mereka. Namun, perlu diingat bahwa penambahan personel tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, melainkan juga dengan kualitas dan keterampilan yang dimiliki oleh personel tersebut. Dengan kata lain, sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
2. Informasi terkait pelaksanaan kebijakan hadir dalam dua bentuk. Pertama, terdapat informasi mengenai tahapan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Pelaksana harus memiliki pemahaman yang jelas terkait langkah-langkah yang harus mereka ambil ketika diberikan perintah untuk menjalankan tindakan tertentu. Kedua, terdapat informasi mengenai tingkat kepatuhan pelaksana terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. Para pelaksana memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mematuhi hukum yang berlaku. Ini mencakup memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur proses tersebut.
3. Kewenangan biasanya harus bersifat formal agar dapat digunakan secara efektif. Kewenangan memberikan otoritas atau legitimasi kepada pelaksana untuk melaksanakan kebijakan politik. Tanpa kewenangan, para pelaksana tidak akan memiliki legitimasi publik yang dapat menghentikan pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, ketika kewenangan telah diberikan, seringkali sulit untuk menilai seberapa efektifnya. Kewenangan harus

diimplementasikan dengan efektif agar proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Namun, jika kewenangan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan kebijakan.

4. Implementasi kebijakan juga memerlukan fasilitas fisik. Meskipun pelaksana memiliki personil yang mencukupi dan memahami tindakan yang harus diambil, implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

**Variabel Disposisi.**

Sikap para pelaksana kebijakan, yang dikenal sebagai disposisi mereka, merupakan komponen kunci ketiga dalam pendekatan terhadap implementasi kebijakan publik. Variabel disposisi mencakup elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan:

1. Penunjukan birokrat: Sikap atau disposisi pelaksana memiliki potensi menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan jika pelaksana tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan penunjukan pelaksana kebijakan sebaiknya dilakukan oleh ahli kebijakan, khususnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penunjukan birokrat yang memiliki komitmen dan disposisi yang sejalan dengan tujuan kebijakan dapat meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Manipulasi insentif merupakan salah satu strategi yang diusulkan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana kebijakan. Pembuat kebijakan dapat dipengaruhi melalui manipulasi insentif karena mayoritas orang cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka. Para pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif jika insentif seperti peningkatan keuntungan atau pengurangan biaya tertentu dapat diatur dengan baik. Dengan memahami dan memanfaatkan insentif yang sesuai, kepatuhan para pelaksana terhadap kebijakan dapat ditingkatkan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lebih lancar.

**Variabel Struktur Birokrasi**

Karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan mungkin mengalami kendala atau bahkan tidak dapat terwujud, meskipun para pelaksana kebijakan mengetahui dengan jelas apa yang seharusnya dilakukan atau memiliki keinginan untuk melaksanakannya. Kebijakan yang bersifat kompleks seringkali memerlukan kerja sama dari berbagai pihak agar dapat berhasil diimplementasikan dengan efektif. Dalam konteks ini, struktur birokrasi yang tidak mendukung kebijakan yang ada dapat mengakibatkan pembagian sumber daya yang tidak efektif, yang pada gilirannya dapat menghambat kemajuan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa struktur birokrasi mendukung dan berkolaborasi secara efisien dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Apabila birokrasi tidak memberikan dukungan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, alokasi sumber daya dapat menjadi tidak efektif, yang pada akhirnya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, menjadi krusial bagi birokrasi untuk dapat bekerja sama secara sinergis guna memberikan dukungan yang diperlukan bagi keberhasilan implementasi kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Kerjasama yang baik antara birokrasi dan kebijakan akan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan kebijakan, menghindari potensi hambatan atau kendala yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan.

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus mampu menjalin kerja sama yang efektif guna mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik, terutama mengingat bahwa kebijakan yang kompleks memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Jika struktur birokrasi tidak berkolaborasi secara efektif dengan kebijakan yang telah ditetapkan, alokasi sumber daya dapat menjadi tidak efisien, yang pada gilirannya dapat menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, keselarasan dan kerja sama yang baik antara birokrasi dan kebijakan menjadi esensial untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Hal ini akan menghindarkan kemungkinan hambatan atau kendala yang dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

**Konsep Kesiapan Kerja**

Menurut Slameto (2015) mengatakan bahwa kesiapan (readiness) adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Kesiapan menurut Djaali (2008) merupakan kemampuan untuk menerima suatu situasi dan bertindak dengan cepat, dengan begitu individu bisa dikatakan siapa menghadapi suatu hal adalah ketika ia mampu untuk merespon stimulus dengan cepat dan tepat.

Ketut (Wibowo, 2020) kesiapan kerja merupakan kemampuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, serta sesuai dengan potensi-potensi siswa dalam berbagai jenis pekerjaan yang secara langsung dapat diterapkannya. Sedangkan menurut Sofyan (Wibowo, 2020) berpendapat bahwa kesiapan kerja adalah kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, tanpa mengalami kesulitan dan hambatan dengan hasil yang baik.

Menurut Pool dan Sewell (2007) menyatakan bahwa secara keseluruhan kesiapan kerja terdiri dari empat aspek utama, yaitu:

1. Keterampilan, kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman yang didapat. Keterampilan bersifat praktis, keterampilan interpersonal, kreatif, berbikir kritis dan mampu memecahkan masalah, bekerja sama, dapat menyesuaikan diri, dan keterampilan berkomunikasi.
2. Ilmu pengetahuan, yang menjadikan pendidikan sebagai dasar secara teoristis sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi ahli sesuai dengan bidangnya.
3. Pemahaman kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah diketahui dan diingat, sehingga pekerjaannya bisa dilakukan dan diperolah kepuasan sekaligus mengetahui apa yang menjadi keinginannya. Memahami pengetahuan yang telah dipelajari, menentukan, memperkirakan, dan mempersiapkan yang akan terjadi, dan mampu mengambil keputusan.
4. Atribut kepribadian, mendorong seseorang dalam memunculkan potensi yang ada dalam diri. Kepribadian dalam lingkup pekerja adalah etika kerja, bertanggung jawab, semangat berusaha, manajemen waktu, memiliki kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama.

Menurut Haryanti (2022) Kesiapan siswa dalam memasuki dunia kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam diri sendiri (internal) dan faktor-faktor dari luar diri sendiri (eksternal).

1. Faktor-faktor dari dalam diri sendiri meliputi: 1) pengetahuan, 2) keterampilan, dan 3) kesiapan mental yang dimiliki oleh siswa itu sendiri sesuai dengan kompetensi keahliannya masing-masing.
2. Faktor-faktor dari luar diri sendiri meliputi: 1) peran sarana dan prasarana sekolah, 2) keluarga, 3) masyarakat, 4) informasi dunia kerja, serta 5) pengalaman kerja.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, sebuah metode yang melibatkan interpretasi pengetahuan dari berbagai sumber data, seperti wawancara dan observasi. Pada beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan peneliti untuk lebih tertarik pada pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan metode ini dianggap mampu menggantikan metode statistik dengan pemahaman yang lebih mendalam melalui akal sehat (Ali dan Yusof, 2011). Keberhasilan pendekatan kualitatif terletak pada kemampuannya untuk menyajikan informasi yang kaya dan kontekstual, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat lebih fokus pada interpretasi makna dan kompleksitas dalam konteks yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi pilihan yang lebih relevan dalam merespon dinamika dan kompleksitas fenomena yang cenderung sulit diukur secara statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dimensi Komunikasi

Komunikasi dalam pelaksanaan program Pendidikan S1 Agribisnis di Lapas Kelas I Madiun memegang peranan penting dalam memastikan koordinasi yang efektif antara berbagai unit kerja. Berdasarkan wawancara dengan petugas dan pengajar, komunikasi antara unit kerja umumnya terjalin dengan baik. Petugas 1 menyatakan bahwa komunikasi dilakukan dengan baik, tetapi masih ada tantangan dalam hal koordinasi strategis. Pentingnya konsolidasi awal menjadi catatan utama untuk memastikan kelancaran program. petugas 2 mengakui bahwa komunikasi telah berjalan baik bisa dilihat dari adanya laporan tiap semster mengenai perkembangan mahasiswa dari pihak lapas ke pihak pemkot. Pengajar menjelaskan bahwa untuk komunikasi sudah berjalan baik namun ada hal yang perlu di perhatikan karena terkadang ada keterlambatan dalam pengumpulan tugas tugas perkulihan dikarenkan petugas tidak menyampaikan dengan baik ke mahasiswanya, jadi masih diperlukannya peningkatan koordinasi. Oleh karena itu, peningkatan dalam hal penyampaian informasi dan sinkronisasi antar unit akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam program.

1. Sumber daya (*Resource*)

   Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek krusial dalam pelaksanaan program Pendidikan S1 Agribisnis. Berdasarkan wawancara dengan petugas, pengelolaan SDM di Lapas Kelas I Madiun menghadapi beberapa keterbatasan, terutama dalam hal anggaran dan sumber daya. Salah satu tantangan utama yang disampaikan oleh Petugas 1 adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini berdampak pada proses rekrutmen mahasiswa, yaitu narapidana yang berminat mengikuti program pendidikan ini. Anggaran yang terbatas membatasi jumlah narapidana yang bisa direkrut, sehingga tidak semua narapidana yang layak dan memenuhi syarat dapat mengikuti program. Hal ini menjadi kendala dalam memperluas jangkauan program pendidikan yang sebenarnya dapat memberikan manfaat besar bagi lebih banyak narapidana. sedangkan Petugas 2 menekankan evaluasi berkala yang dilakukan setiap akhir semester guna memonitoring perkembangan mahasiswa, dikarenkan program ini adalah program beasiswa Sedangkan Pengajar menekakan kurangnya kendala sarana saat pelaksanaan perkuliahan jarak jauh. Dari hasil tersebut dapat diketahui jika Lapas Kelas I Madiun telah melaksanakan program dengan cukup baik.

2. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pihak penyelenggara program berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program. Berdasarkan wawancara, disposisi antara petugas Lapas dan pihak pendidik umumnya positif. Petugas 1 mencatat adanya kerjasama yang baik meskipun masih diperlukan perbaikan dalam koordinasi dan implementasi. Petugas 2 dan pengajar menjelaskan bagaimana disposisi terjadi saat program ini perkuliahan ini berjalan. Sikap proaktif dan komitmen dari kedua pihak ini sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, terutama dalam lingkungan lapas yang memiliki banyak keterbatasan.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Pendidikan S1 Agribisnis di Lapas Kelas I Madiun memainkan peran penting dalam mengatur alur kerja dan tanggung jawab. Berdasarkan wawancara, struktur birokrasi yang sederhana dinilai sudah cukup baik walaupun butuh sedikit perbaikan agar program pendidikan bisa berjalan lebih efisien. Petugas 1 mengidentifikasi tantangan dalam menyesuaikan birokrasi dengan kebutuhan pendidikan di Lapas. Petugas 2 menjelaskan terkait pembaigian pihak terkait antara pihak lapas dan pengajar sedangkan pengajar memperjelas bagaimana pembagian tugas pengawas dan pengajar. Dijelaskan dalam MoU perjanjian kerja antara Pihak Kesatu (Pemkot Madiun), Pihak Kedua (Lapas Kelas I Madiun), Pihak Ketiga (Universitas Terbuka Surabaya) dijelaskan disana bahwa Pemkot Madiun sebagai pembiaya tetap pada program ini, Lapas 1 Madiun sebagai tempat pelaksanaan program dan Universitas Terbuka sebagai pihak pengajar pada program ini. Adapun Hak dan Kewajiban yang dijelaskan di dalam MoU perjanjian antara pihak pemkot, Lapas dan pihak universitas terbuka terdapat di bagian lampiran penelitian ini.

Struktur birokrasi yang ada sudah mendukung kelancaran program, dengan adanya hierarki yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang. Struktur ini memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan.

**Dimensi Faktor-Faktor yang Bersumber pada Diri**

1. Pengetahuan dalam Bidang Agribisnis

Pengetahuan di bidang agribisnis berperan krusial dalam mempengaruhi kesiapan kerja narapidana setelah pembebasan. Program Pendidikan S1 Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun telah memberikan pengetahuan yang mendalam dan aplikatif dalam bidang ini. Pengetahuan yang diperoleh selama program ini berfungsi sebagai dasar yang kuat bagi narapidana untuk memasuki dunia kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, narapidana yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agribisnis cenderung lebih siap menghadapi tantangan pasca-pembebasan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengetahuan ini tidak hanya menambah keterampilan tetapi juga memberikan kepercayaan diri yang diperlukan untuk beradaptasi dengan dunia kerja. Program ini memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan industri, sehingga narapidana merasa lebih siap untuk menghadapi tuntutan pasar kerja setelah keluar dari penjara.

2. Keterampilan Praktis dalam Bidang Agribisnis

Keterampilan praktis merupakan aspek penting dalam kesiapan kerja narapidana. Program pendidikan yang berfokus pada keterampilan praktis memungkinkan narapidana untuk memperoleh keahlian yang langsung dapat diterapkan di dunia kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun dalam semster 1 ini belum ada

kegiatan praktis yang dilaksanakan pada perkulihan tapi narasumber sendiri mengakui bahwasanya keterampilan praktis yang relevan dan aplikatif memberikan keuntungan kompetitif di pasar kerja nanti sebagai modal utama pengalaman kerja. Keterampilan ini membantu narapidana mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi setelah pembebasan.

Program ini berusaha untuk menyediakan pelatihan yang memungkinkan narapidana untuk memperoleh keterampilan yang diperlukan dan meningkatkan kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja.

3. Kesiapan Mental

Kesiapan mental juga memainkan peran penting dalam kesiapan kerja narapidana. Narapidana yang memiliki kesiapan mental yang kuat dan positif cenderung lebih berhasil dalam menavigasi tantangan pasca-pembebasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan mental yang baik membantu narapidana merasa lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi dunia kerja.

Program pendidikan tidak hanya fokus pada aspek teknis dan praktis tetapi juga mencakup pengembangan mental, yang membantu narapidana mengatasi tekanan dan stres yang mungkin mereka hadapi setelah pembebasan. Kesiapan mental yang baik meningkatkan peluang narapidana untuk sukses dalam pekerjaan mereka dan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan kerja.

**Dimensi Faktor Sosial**

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam mendukung program Pendidikan S1 Agribisnis. Penelitian menunjukkan bahwa fasilitas yang memadai, seperti ruang pelatihan dan materi pembelajaran, berkontribusi pada efektivitas program. Sarana dan prasarana yang baik memungkinkan narapidana untuk mendapatkan pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki untuk lebih memenuhi kebutuhan pendidikan. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan akan semakin memperkuat kesiapan narapidana untuk memasuki dunia kerja setelah pembebasan.

2. Dukungan Keluarga

Dukungan dan dorongan dari keluarga memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan kerja narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan positif dari keluarga dapat meningkatkan motivasi narapidana dan membantu mereka merasa lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Keluarga yang mendukung memberikan dorongan tambahan yang memastikan narapidana tetap fokus pada tujuan mereka dan memanfaatkan kesempatan yang ada dalam program pendidikan. Dukungan keluarga yang kuat berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan kerja narapidana setelah pembebasan.

3. Stigma Masyarakat

Stigma masyarakat dapat mempengaruhi persepsi narapidana terhadap peluang kerja di bidang agribisnis. Penelitian menunjukkan bahwa stigma negatif dari masyarakat sering kali menjadi penghalang bagi narapidana dalam mencari pekerjaan. Narapidana mungkin merasa tertekan dan kurang percaya diri karena adanya pandangan negatif masyarakat, yang dapat mengurangi kepercayaan diri mereka dan mempersulit pencarian pekerjaan. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan

menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi mantan narapidana.

4. Informasi Dunia Kerja

Akses terhadap informasi tentang pekerjaan di bidang agribisnis juga menjadi faktor penting dalam kesiapan kerja narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa narapidana sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi yang relevan dan akurat mengenai peluang kerja setelah pembebasan. Ditunjukan di hasil wawancara bahwa mereka masih keterbatasan akses informasi karena mereka hanya mendapatkan informasi dari keluarga, dan juga pemerintah yang telah menjanjikan pekerjaan setelah lulus nanti, keterbatasan ini dapat menjadi kendala signifikan bagi narapidana dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan akses yang lebih baik terhadap informasi dunia kerja, termasuk peluang karir dan perkembangan industri agribisnis.

5. Pengalaman Kerja Praktis

Pengalaman kerja praktis di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan aspek yang mendukung kesiapan kerja narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa program ini sudah diadakan tetapi tidak semua narapidna bisa mendapatkan pelatihan pengalaman kerja praktis dan kedepannya akan dibuat program yang dapat membantu narapidana untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis dibidang agribisnis secara langsung. Program-program ini membantu narapidana memperoleh keterampilan yang berguna dan relevan sebelum mereka keluar dari penjara, meningkatkan kesiapan mereka untuk memasuki dunia kerja. Pengalaman kerja praktis yang diperoleh selama program pendidikan berfungsi sebagai jembatan yang penting untuk transisi yang lebih mulus ke pasar kerja.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data analisis yang di dapatkan oleh penulis maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Dari empat dimensi utama (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), implementasi program Pendidikan S1 Agribisnis di Lapas Kelas I Madiun menunjukkan
   a. Dimensi komunikasi

      Dimensi komunikasi merupakan aspek kunci dalam keberhasilan pelaksanaan program Pendidikan S1 Agribisnis di Lapas Kelas I Madiun. Komunikasi antar unit kerja telah berjalan dengan cukup baik. Setiap unit kerja, baik dari pihak Lapas, pengajar, dan pemkot, sudah terlibat dalam komunikasi yang rutin. Evaluasi secara berkala telah dilakukan, dan ada sistem pelaporan yang memadai untuk memastikan setiap perkembangan dan kebutuhan program dapat terpantau dan dikelola dengan baik. Tantangan yang sering muncul ialah keterlambatan informasi, sinkronisasi yang lebih kuat diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas program.

   b. Sumber Daya (Resource)

      Dalam proses rekturtmen sendiri lapas madiun sangat selektif dalam Sumber daya di lapas kelas I Madiun sendiri Keterbatasan sumber daya juga menjadi penghambat, masih adanya kekurangan dalam anggaran, sarana dan prasarana pendukung dalam program yang berdampak pada proses rektrutmen dan juga proses belajar mengajar.

   c. Disposisi

      Disposisi dalam program ini juga menentukan bagaimana kelancaran dari program ini, pihak dari program ini juga sudah membuat disposisi yang cukup baik dari mulai hubungan harmonis dan kerjasama yang kompak antar pihak membantu

kelancaran perencanaan dan implementasi program.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokasi juga sangat menentukan bagaimana jalannya program ini, struktur birokasi yang sederhana dapat mendukung alur kerja dari program ini.

Secara keseluruhan, implementasi program Pendidikan S1 Agribisnis di Lapas Kelas I Madiun berjalan dengan baik, meski masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditangani. Peningkatan koordinasi, pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, serta penyederhanaan birokrasi akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan kesuksesan program di masa mendatang.

2. Kesiapan kerja narapidana setelah mengikuti program ini juga dipengaruhi oleh faktor dalam diri meliputi:

a. Faktor dalam diri

1) Pengetahuan

Pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui program pendidikan membekali narapidana dengan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek agribisnis, seperti manajemen produksi, distribusi, pemasaran, dan pengolahan hasil pertanian. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk memiliki kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan rekan kerja dan atasan di masa depan, serta membuat keputusan yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Ketika narapidana memiliki dasar pengetahuan yang kuat, mereka merasa lebih percaya diri untuk terlibat dalam diskusi, presentasi, dan kolaborasi, yang penting dalam dunia kerja di sektor agribisnis,

2) Keterampilan praktis

Hanya mengandalkan pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk membuat narapidana kompetitif di pasar kerja agribisnis yang semakin dinamis dan praktis. Oleh karena itu, pelatihan langsung yang relevan dengan kebutuhan pasar sangat penting. Pelatihan langsung memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menerapkan teori yang telah dipelajari dalam situasi nyata, meningkatkan keterampilan teknis dan praktis yang dibutuhkan di lapangan.

3) Kesiapan mental

Didukung dari kondisi mental dari warga binaan yang baik juga mempengaruhi agar dapat mudah beradaptasi dan mengatasi tekanan di dunia kerja pasca-pembebasan.

b. Faktor luar diri

1) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di dalam lembaga pemasyarakatan membantu memperkuat kualitas pelatihan dan pendidikan yang diberikan,

2) Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga memainkan peran besar dalam memotivasi narapidana untuk tetap berfokus pada tujuan mereka dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi dunia kerja dukungan dari keluarga sendiri juga dapat mengurangi stigma masyarakat

3) Stigma Masyarakat

Dapat diketahui jika stigma masyarakat menjadi tantangan utama yang bisa menghambat narapidana dalam mencari pekerjaan, meskipun memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup, Penghapusan stigma dan penerimaan masyarakat diperlukan agar narapidana dapat lebih percaya diri memasuki dunia kerja,

4) Akses Informasi dunia kerja

diperlukannya akses untuk mengetahui informasi dunia kerja di bidang agribisnis juga membantu meningkatkan kesiapan kerja nantinya, karena dengan adanya akses informasi yang cukup dapat mengurangi hambatan narapidana dalam mengeksplorasi peluang karier yang relevan, meningkatkan akses informasi akan membantu narapidana lebih siap menghadapi dunia kerja,

c. Pengalaman kerja praktis

Pengalaman kerja praktis di dalam lapas memberi kesempatan bagi narapidana untuk mempraktikkan keterampilan mereka, memperkuat kesiapan mereka untuk transisi ke dunia kerja setelah pembebasan.

Secara keseluruhan narapidana yang mengikuti program ini menjadi jauh lebih siap untuk bekerja dikarenakan mereka sudah memiliki bekal bekal yang mereka percaya dapat membantu mereka nanti saat pembebasan nanti.

## DAFTAR REFERENSI

Basset-Jones, N., & Lloyd, G.C (2005). Does Herzberg's motivation theory have staying power? Journal of Management deveIopment, 24(10), 929-943

Creswell, J. W. (2014) Research Design; Qualitative, Quantitative, And Mixed Method Approaches. 4th edn. London, UK: Sage Publication Ltd.

Gilang Setiawan, A., Subroto, M., Kunci, K., & Pemasyarakatan, (2023). Pentingnya Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan untuk Narapidana Anak INFO ARTIKEL ABSTRAK. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, *12*, 2023. https://doi.org/10.19109/intelektualitas.v12i02.19620

Kahfi, M., Politeknik, S., & Pemasyarakatan, (2023). PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA DI LAPAS KELAS IIA PADANG. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 11, Issue 3). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Melayu, H. (1996) Organisasi Dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas. Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Munir Yusuf. (2018). Pengantar Ilmu Pendidikan. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Kota Palopo

Roulina, A., Sari, M., Muhammad, A., Tando, C. E., Kemasyarakatan, B., & Pemasyarakatan, I. (n.d.). *Pelaksanaan Program Pendidikan Narapidana (PiIot Project) Pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang* (Vol. 4).

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (20163. Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta